

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi merupakan salah satu kebutuhan instansi pemerintahan saat ini. Pada era globalisasi ini, teknologi dan informasi sudah berkembang pesat dan maju. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penggunaan teknologi di berbagai bidang dalam aspek kehidupan manusia, Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong pemerintah untuk mengadopsi inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pemerintahan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat secara keseluruhan..

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah memberikan banyak keuntungan bagi organisasi pemerintah, lembaga antar pemerintah, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Adopsi konsep pemerintahan berbasis elektronik telah menghasilkan manfaat yang signifikan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan, serta meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah. Dengan demikian, perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu aspek kunci dalam upaya perbaikan dan transformasi pemerintah.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kita ke dalam suatu masalah yaitu kesulitan untuk mengikuti perkembangannya. Mengikuti dan mengadaptasi perkembangan teknologi khususnya sistem teknologi informasi, merupakan tantangan yang sangat besar untuk profesi akuntansi. Profesi akuntansi tidak dapat mengabaikan perkembangan sistem teknologi informasi karena semakin

banyak masyarakat bisnis, industri, ekonomi dan ilmu pengetahuan yang menggunakan dan mengembangkan sistem teknologi informasi dengan intensitas yang berbeda-beda. Penguasaan terhadap sistem informasi teknologi ini akan menentukan luas lahan pekerjaan bagi profesi akuntan di masa mendatang. dengan perkembangan teknologi tugas teknis akuntan dapat digantikan oleh komputer oleh sebab itu pengawasan terhadap sistem teknologi informasi mutlak bagi akuntan baik dalam pengertian sebagai pemakai penyusun pembuat dan pengembang sistem teknologi informasi (M. Rizal, 2008)

Kementerian Dalam Negeri menciptakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan contoh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang memadai dengan ditunjang teknologi informasi yang terintegrasi mulai dari proses perencanaan dan penganggaran sampai dengan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. SIPD merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah.

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai seberapa besar tingkat pencapaian hasil yang diharapkan telah tercapai. Jika pencapaian tersebut tinggi, kita dapat menyimpulkan bahwa itu efektif, sedangkan jika pencapaian rendah, belum dapat dikategorikan sebagai efektif. Menurut Andrew J. Dubrin (2019), Efektivitas organisasi mencerminkan sejauh mana organisasi mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien.. Ketika organisasi mencapai tujuan tersebut, bisa dibilang bahwa organisasi tersebut beroperasi secara

efektif. Poin yang sangat penting untuk diingat adalah bahwa efektivitas tidak hanya berkaitan dengan sejauh mana biaya yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas lebih menilai sejauh mana yang dikerjakan telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Sedangkan efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan suatu ukuran yang bisa memberikan gambaran sejauh mana pencapaian tujuan dari sekelompok sumber daya yang telah diatur untuk memproses, mengumpulkan, dan menyimpan data secara elektronik kemudian data tersebut diubah menjadi informasi yang dapat digunakan dan menghasilkan laporan formal dengan kualitas yang baik dan disajikan tepat waktu. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 391 tentang Pemerintahan Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah berupa informasi pembangunan daerah ataupun informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu informasi. Undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik melalui penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) mewajibkan Pemda untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Teknologi Informasi (TI) merupakan suatu teknologi yang dipakai dalam mengolah suatu data seperti mendapatkan data, memproses data, menyusun data, hingga menyimpan data dengan tujuan menghasilkan informasi yang berkualitas.

Teknologi berbasis sistem informasi digunakan dalam organisasi untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan seperti membuat buku besar umum, manajemen inventaris, pengadaan, penggajian, dan sebagainya. Pemanfaatan teknologi informasi yang efektif berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap kinerja organisasi, oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi dalam setiap organisasi harus dilakukan dengan tepat dan efisien (Lucas & Spitler, 2015).

Masalah yang sering terjadi yaitu ketika teknologi yang telah diimplementasikan pada sistem informasi tidak digunakan dengan optimal oleh individu pegawai atau ketika teknologi tersebut mengalami berbagai masalah seperti kesalahan (error), sehingga teknologi tersebut tidak memberikan manfaat sesuai yang diharapkan, yang diakhir akan menyebabkan penurunan kinerja pegawai.

Penggunaan teknologi informasi selalu berkaitan dengan kemampuan Teknik personal dalam memanfaatkan teknologi informasi. Semakin tinggi kemampuan pengguna dalam menggunakan teknologi maka akan semakin maksimal manfaat yang dapat di peroleh. Kemampuan teknik personal sistem informasi merupakan kemampuan pengguna menggunakan suatu sistem informasi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Semakin tinggi kemampuan teknik personal dalam menggunakan sistem maka akan semakin cepat pula tugas-tugasnya dapat diselesaikan, hal ini dapat mendorong tingkat kepuasan pengguna terhadap SIPD dan dapat meningkatkan keefektivitasan terhadap sistem yang digunakan oleh instansi. Pendapat ini didukung oleh penelitian widodo dan Pratama (2020) yang

menunjukkan adanya nilai positif antara kemampuan Teknik personal terhadap efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Teknik personal, salah satunya adalah dengan memberikan program pelatihan kepada pengguna. Program pelatihan pengguna adalah program yang dirancang khusus untuk memberikan pelatihan kepada pengguna akhir atau pengguna sistem terhadap penggunaan suatu teknologi, perangkat lunak, atau sistem tertentu. Tujuan utama dari program pelatihan pengguna adalah agar pengguna dapat menguasai dan menggunakan sistem atau teknologi tersebut dengan efektif dan efisien.

Instansi dapat memberikan program pelatihan pengguna untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai, meningkatkan produktivitas, penyesuaian terhadap perubahan dan meningkatkan kualitas pengguna. Dengan program pelatihan semacam ini, pengguna akan memiliki pengetahuan yang lebih dan keterampilan yang lebih baik dalam memanfaatkan sistem tersebut. Semakin tinggi kemampuan pengguna dalam memanfaatkan sistem tersebut, semakin besar kontribusinya terhadap efektivitas sistem. Hal ini didukung oleh penelitian Widodo dan Pratama (2020) yang mengungkapkan bahwa program pelatihan pengguna berpengaruh positif terhadap efektivitas sipd, selain itu pendapat ini juga didukung oleh penelitian Purnomo dan Firdaus (2019) yang menemukan hal yang sama.

Untuk bisa mencapai tujuan dan kesuksesan instansi maka diperlukan dukungan manajemen. Dukungan manajemen sangat penting dalam mencapai kesuksesan dan kinerja yang optimal. Dukungan manajemen mencakup proses

menyediakan sumber daya, informasi, dan bimbingan kepada karyawan dalam upaya mereka mencapai tujuan organisasi Stephen P. Robbins (2020). Dukungan manajemen dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sangat penting dalam konteks efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan daerah. Dukungan manajemen dalam bisa terlihat dari pengalokasian sumber daya, pengambil keputusan yang informasional, pelatihan dan pengembangan pegawai, mendukung transparansi dan akuntabilitas serta pengawasan dan evaluasi.

Widodo dan pratama (2020) mengemukakan bahwa Dukungan manajemen yang kuat dalam implementasi dan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi operasional, transparansi pengelolaan keuangan, serta akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Begitu juga dengan Purnomo dan Firdaus (2019) yang berpendapat bahwa semakin besar dukungan yang diberikan manajemen maka akan semakin meningkat pula kinerja sistem informasi yang ada, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah.

Pemerintah Kota Medan Merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sistem ini mulai digunakan sejak tahun 2020. Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan perencanaan dan penganggaran selaras menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, yang terakhir dirubah melalui UU Nomor 9 Tahun 2015. Pemerintahan juga sudah mengeluarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pasal 274 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan

daerah berdasarkan data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. SIPD sebagaimana dimaksud pada Permendagri No 70 Tahun 2019 dikembangkan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan informasi perencanaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah serta informasi lainnya.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka melakukan pertanggungjawaban proses Perencanaan serta Anggaran, penggunaan teknologi adalah kewajiban yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah. Percepatan penerapan SIPD diharapkan agar Pemerintah Daerah segera menyatukan seluruh sistem dengan data pembangunan wilayah serta data keuangan wilayah ke SIPD. Hal ini merupakan porsi penting dalam mengambil alih kendali guna mencapai tujuan yang telah diharapkan (Ekaputra, 2021).

SIPD mampu menginovasi rangkaian proses perencanaan menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan, sesuai dengan aturan dan arahan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 70 tahun 2019. Upaya tersebut juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan ini memerlukan pemahaman yang baik dari setiap aparaturnya yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah beserta instansi-instansinya (Hasanah & Rumondang, Tapi). Bukan hanya itu, terdapat amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang meminta seluruh Pemda untuk mengintegrasikan antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran pemerintah daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan. Bahkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia terdapat beberapa regulasi terkait pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang juga baru saja diterbitkan, serta aturan kebijakan yang diterbitkan oleh Kemendagri, seperti PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta yang terakhir adalah Permendagri 70 tahun 2019 tentang SIPD memiliki tujuan yang serupa, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Akan tetapi pada kenyataannya, tidak ada sistem yang sempurna, masih terdapat beberapa kelemahan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam banyak pekerjaan dan proses penginputan, yang sebenarnya merupakan situasi yang disayangkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai masalah ini dan mencapai tujuan sistem ini, persiapan yang matang diperlukan dari setiap entitas pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun pusat. Persiapan ini melibatkan aspek-aspek penting, termasuk kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten, yang mampu mengatasi tantangan yang ada. Selain itu, sumber daya penunjang seperti sarana dan prasarana juga harus

tersedia. Jika entitas pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun pusat, tidak sigap dan tidak bersinergi dengan baik dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini, maka risiko tertinggal dan kesulitan dalam mencapai perkembangan yang diinginkan akan semakin besar.

Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad Irfan dan Nurwani (2021) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh beberapa OPD, terutama di BPKAD Kota Medan, menghadapi sejumlah kendala dalam pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kendala-kendala tersebut disebabkan oleh beban kerja yang tinggi, yang memerlukan pengisian banyak menu dalam SIPD. Akibatnya, seringkali para pegawai melewati satu atau beberapa tahap penginputan, mengakibatkan perbedaan dalam laporan keuangan, penundaan dalam pergeseran anggaran, hambatan dalam proses penggajian, serta masalah jaringan SIPD yang sering mengalami gangguan. Semua ini berdampak negatif pada penyusunan anggaran kas, pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Selanjutnya menurut penelitian Rhandu dan Reksodiputro (2022) penerapan SIPD berbentuk website memiliki tujuan agar memudahkan dan mempercepat dalam melaksanakan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik, akan tetapi dalam pelaksanaan program ini sangat rumit, seharusnya memerlukan komunikasi, kerja keras dan Kerjasama dari setiap instansi yang ada di pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfianai dan Juliana Nasution (2022) menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumatera Utara, sudah efektif berdasarkan analisis melalui poin-poin kualitas yang termasuk kategori yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan, ditemukan bahwa penerapan SIPD sudah efektif. Namun, perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Ini berbeda dengan penelitian lain yang berpendapat bahwa penggunaan SIPD belum efektif, seperti yang disebutkan oleh Wurara et al. (2020), yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman pegawai dalam mengoperasikan SIPD membuat penerapannya kurang efektif. Selain itu, Ekaputra (2021) juga mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa implementasi SIPD kurang efektif dari segi kualitas dokumen RKPD yang dihasilkan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa faktor independen untuk mengetahui efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah yaitu faktor penggunaan teknologi informasi, kemampuan Teknik personal, program pelatihan pengguna dan dukungan manajemen.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryanto & Handayani (2021), mengemukakan bahwa penggunaan teknologi informasi memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sistem informasi pemerintahan daerah. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Sulistyio & Wibowo (2021) peneliti ini menyoroti bahwa teknologi informasi hanya menjadi alat atau sarana untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan informasi, namun keberhasilan dan efektivitas penerapan SIPD juga sangat bergantung pada faktor manusia, seperti kemampuan pengguna dalam memanfaatkan teknologi dengan baik, serta dukungan dan komitmen dari pihak-pihak terkait dalam organisasi..

Selanjutnya, menurut Wibowo & Nugroho (2020) bahwa Kemampuan pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Akhlaq & Hani (2018) yang mengatakan bahwa Kemampuan pengguna tidak berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah.

Penting untuk dicatat bahwa pelatihan dapat meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem informasi pemerintahan daerah. Semakin tinggi kemampuan pengguna dalam menggunakan SIPD, semakin besar kontribusinya terhadap kinerja SIPD dalam pemenuhan tugas-tugasnya dan dalam meningkatkan kepuasan pengguna terhadap SIPD. Hal ini didukung oleh penelitian Wibowo & Nugroho (2020) yang mengungkapkan bahwa program pelatihan dan pengembangan kompetensi teknis berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja sistem informasi pemerintahan daerah, selain itu pendapat ini juga didukung oleh penelitian Widodo & Pratama (2021) yang menemukan hal yang sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo & Aditama (2021) menyatakan bahwa dukungan manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Sulistyono & Wibowo (2021) menyatakan bahwa dukungan manajemen tidak berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat ketidakpastian penelitian terhadap efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah. Hal ini mendorong peneliti untuk melanjutkan penelitian mengenai efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah di lingkungan organisasi

pemerintah yang didukung oleh adanya fenomena terhadap efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kemampuan Teknik Personal, Program Pelatihan Pengguna Dan Dukungan Manajemen Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kota Medan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Terdapat Perbedaan antara tujuan yang diharapkan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi pada pengaplikasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) :

1. Pemanfaatan teknologi informasi pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum mencapai potensinya secara maksimal dikarenakan oleh berbagai hambatan teknis yang muncul, seperti gangguan jaringan yang sering terjadi atau mengalami error dan masih adanya kebutuhan perbaikan dan pengembangan dalam pelaksanaan aplikasi SIPD.
2. Kemampuan Teknik personal dalam mengoperasikan aplikasi SIPD masih perlu ditingkatkan, mengingat kompleksitas penggunaan aplikasi ini. Dibutuhkan tingkat kompetensi yang lebih tinggi untuk mengelola sistem tersebut agar efektif.
3. Untuk mengoptimalkan penggunaan SIPD, diperlukan program pelatihan bagi pengguna. Seperti yang kita ketahui, bahwa aplikasi ini masih relatif baru, sehingga para pengguna perlu mengikuti pelatihan untuk memahami dan memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal

4. Dukungan manajemen sangat penting dalam mendukung penerapan SIPD, baik dalam aspek dukungan teknologi informasi maupun penyelenggaraan pelatihan seperti BIMTEK. Hal ini merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kesuksesan penggunaan SIPD.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar penelitian ini dapat mencapai tujuannya secara akurat dan tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini dibatasi oleh beberapa variabel saja. Adapun variabel yang digunakan sebagai batasan dalam penelitian ini adalah Teknologi informasi, kemampuan teknik personal, program pelatihan pengguna, dan dukungan manajemen.
2. Objek dalam penelitian ini hanya meliputi organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di kota medan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah kota Medan ?
2. Apakah kemampuan teknik personal berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah kota Medan ?

3. Apakah program pelatihan pengguna berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah kota Medan ?
4. Apakah dukungan manajemen berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah kota Medan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang peneliti inginkan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) di kota Medan.
2. Menguji kemampuan teknik personal terhadap efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) di kota Medan.
3. Menguji pengaruh program pelatihan pengguna terhadap efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) di kota Medan.
4. Menguji pengaruh dukungan manajemen terhadap efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) di kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi pemerintahan

daerah (SIPD), dengan mempelajari teori-teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi penelitian terkait dan menjadi bahan acuan untuk penelitian dengan objek yang lebih mendalam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pemahaman dan pedoman untuk peneliti yang melakukan sudi selanjutnya serta menjadi pembandingan dengan penelitian lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Organisasi

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya pada organisasi perangkat daerah (OPD), Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi bagi pemerintah daerah dalam menetapkan sistem yang akan diterapkan khususnya tentang efektifitas sistem informasi pemerintahan daerah dalam pengambilan keputusan.